

**BULETIN**



# GINSI *Jateng*

EDISI APRIL 2026 : 995 TAHUN KE- LXX

Khusus untuk Anggota



**Harga Kedelai Di Jakarta  
Tembus Rp19 Ribu/Kg,  
Mendag: Pasokan  
Tak Bermasalah**

**Impor RI Naik  
14,44 Persen Capai  
USD42,09 Miliar  
di Januari-Februari  
2026**



# DAFTAR ISI

## LIPUTAN UTAMA

# 04

**Impor RI Naik  
14,44 Persen  
Capai USD42,09 Miliar  
di Januari-Februari  
2026**



# 06

## NERACA

**Impor Indonesia  
USD 20,8 Miliar  
di Februari 2026,  
Naik 10,8%**

# 08

## NERACA

**BPS Catat Nilai Ekspor  
Jateng Per Maret  
Tembus 1.010,70 Juta  
Dolar AS**



# 10

## KOMODITAS

**Impor Kedelai RI Melonjak,  
Negara Ini Jadi Pemasok Utama**



# 14

## KOMODITAS

**Industri Plastik Tertekan Logistik  
Global, Kemenperin Dorong  
Diversifikasi Bahan Baku**



# 16

## KEBIJAKAN

**Per 1 Juli 2026,  
Pemerintah Setop  
Impor Solar**

# 19

## KEBIJAKAN

**Purbaya Kenakan Bea Masuk  
Anti Dumping Impor BOPET  
dari 3 Negara Ini**

# 20

## KEBIJAKAN

**Aturan Baru Pembebasan  
Bea Masuk dan Cukai Atas Impor  
untuk Hibah Resmi Berlaku**

# 24

## KEBIJAKAN

**Mulai 16 April,  
Sistem Pelacakan  
Makanan akan Diterapkan**

# 25

## KOMODITAS

**Harga Bahan Baku Tekstil  
Meroket 40 Persen**

# 26

## KOMODITAS

**Industri Tekstil Cari Impor Baru,  
Tapi Pasokan Global Terbatas**

# 27

## KOMODITAS

**Barantin Fasilitas Pemasukan  
Hewan Ternak dari Australia**



## Sinergi dan Kolaborasi agar Pelaku Usaha Nyaman

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan...

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi mengeluhkan kebijakan otoritas pelabuhan dan pengelola terminal di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Masalah muncul karena pemilik barang masih kesulitan menarik kargo dari pelabuhan.

Kita berharap problem ini tak berlanjut dan bisa teratasi. Bagaimanapun, kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas industri yang menopang perekonomian nasional. BPD GINSI Jateng pun mengalami masalah seperti itu. Situasi serupa juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Munculnya masalah tersebut membuat biaya logistik melambung tinggi. Agar tak muncul problem seperti itu seharusnya kebijakan disesuaikan dengan standar operasional yang telah disampaikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). SK KSOP Tanjung Emas 43 2026. Semua stake holder memang harus bersatu demi kepentingan bersama.

Kalau pelaku usaha merasa nyaman, ini sinyal bagus untuk menopang perekonomian Jateng. Tekad kami tak berubah, yakni menjaga iklim usaha di Jateng tetap kondusif, transparan, dan berdaya saing. Selain itu, berupaya menekan biaya logistik agar harga barang di tingkat konsumen lebih terjangkau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

**H Budi Satrio, SH, MH**



**APRIL 2026**  
NOMOR : 995 TAHUN KE - LXX

### SEKRETARIAT :

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang  
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781  
WA : 082133919046  
Email : ginsi.jateng@gmail.com  
Website : www.ginsijateng.com



pexels-tomfisk

# Impor RI Naik 14,44 Persen Capai USD42,09 Miliar di Januari-Februari 2026

**JAKARTA** – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor pada Januari-Februari 2026 sebesar USD42,09 miliar atau naik 14,44 persen, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 36,78 miliar.

**T**otal nilai impor sepanjang Januari-Februari 2026 naik sebesar 14,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Andil utama peningkatan nilai impor tersebut disumbang oleh impor

bahan baku penolong sebesar 6,78 persen,” ujar Deputy Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono dalam Rilis BPS, Rabu, 1 April 2026.

Ateng merinci, impor migas mengalami penurunan sebesar 3,50 persen atau

menjadi USD5,16 miliar, dibandingkan periode sebelumnya pada tahun yang lalu USD5,35 miliar.

Sementara itu, impor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 17,49 persen atau menjadi USD36,93 miliar, dibandingkan Januari-Februari 2025 yang senilai USD31,43 miliar

Berdasarkan penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan. Adapun sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai bahan baku penolong mencapai USD29,40 miliar atau naik 9,27 persen dengan andil 6,78 persen.

“Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu logam mulia, dan perhiasan/permata, mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya, serta berbagai produk kimia,” jelasnya.

Kemudian, berdasarkan negara dan kawasan tujuan utama impor, peningkatan nilai impor tertinggi terjadi dengan Tiongkok, Australia, Singapura dan Kawasan Uni Eropa. Sementara itu impor dari negara ASEAN mengalami penurunan.

Secara tahunan, nilai impor pada Februari 2026 mencapai USD20,89 miliar atau naik 10,85 persen yoy dibandingkan tahun lalu pada periode sama yang sebesar USD18,85 miliar.

”

**Berdasarkan penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan. Adapun sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai bahan baku penolong mencapai USD29,40 miliar atau naik 9,27 persen dengan andil 6,78 persen.**

Adapun nilai impor migas tercatat USD2 miliar atau turun cukup dalam sebesar 30,36 persen yoy, sementara impor nonmigas tumbuh 18,24 persen dengan nilai USD18,90 miliar.

“Total nilai impor mengalami peningkatan secara tahunan, utamanya didorong oleh peningkatan nilai impor nonmigas, dengan andil 15,47 persen,” tandasnya.(\*)



pexels-freestocks



## Impor Indonesia USD 20,8 Miliar di Februari 2026, Naik 10,8%

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, total nilai impor Indonesia pada Februari 2026 mencapai USD 20,89 miliar atau meningkat 10,85 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

**D**eputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan, nilai impor migas sebesar USD 2 miliar atau turun 30,36 persen secara tahunan. Sedangkan impor

non migas nilainya USD 18,90 miliar atau naik tinggi 18,24 persen.

“Peningkatan nilai impor secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan impor non migas, dengan andilnya sebesar 15,47



pexels-frank-rietsch

persen,” ujar Ateng, Rabu (1/4/2026).

Pada Februari 2026, terjadi peningkatan impor untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunannya. Nilai impor barang konsumsi naik 19,84 persen. Nilai impor bahan baku, bahan penolong juga naik 4,25 persen. Selain itu, untuk nilai impor barang modal naik 33,68 persen.

Adapun di sepanjang Januari-Februari 2026, total impor Indonesia mencapai USD 42,09 miliar, atau naik 14,44 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Nilai impor migas senilai USD 5,16 miliar atau turun 3,50 persen. Sedangkan nilai impor non migas USD 36,93 miliar atau naik cukup tinggi, 17,49 persen,” jelas Ateng.

Secara kumulatif, peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaannya. Impor bahan baku dan penolong

## Peningkatan nilai ekspor Februari 2026 secara tahunan tersebut terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor non migas pada beberapa komoditas. Semisal lemak dan minyak

mencapai USD 29,40 miliar atau naik 9,27 persen. Impor bahan baku penolong ini memberikan andil 6,78 persen.

Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar terutama logam mulia, dan perhiasan atau permata (HS 71), mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85), serta berbagai produk kimia (HS 38).

“Jika dilihat dari negara dan kawasan asal impor, peningkatan nilai impor ini terutama terjadi pada China, Australia, Singapura, serta kawasan Uni Eropa. Sementara impor dari ASEAN mengalami penurunan,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Februari 2026 mencapai USD 22,17 miliar atau naik sebesar 1,01 persen secara tahunan (year on year/ YoY).

Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono melaporkan, nilai ekspor migas pada periode tersebut tercatat sebesar USD 1,08 miliar, atau turun sebesar 4,25 persen. Sedangkan nilai ekspor non migas naik 1,30 persen dengan nilai ekspor USD 21,09 miliar secara YoY.

“Peningkatan nilai ekspor Februari 2026 secara tahunan tersebut terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor

non migas pada beberapa komoditas. Semisal lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), naik 16,19 persen dengan andil 2,17 persen terhadap peningkatan nilai total ekspor,” jelasnya, Rabu (1/4/2026).

Pada saat yang sama, seperti ekspor nikel dan barang daripadanya (HS 75) naik 74,84 persen dengan andil 1,84 persen. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85) naik 28,43 persen dengan andil 1,21 persen.

Adapun untuk ekspor non migas yang tembus USD 21,09 miliar, industri pengolahan jadi sumber terbesar dengan nilai mencapai USD 18,55 miliar. Diikuti sektor pertambangan dan lainnya USD 2,25 miliar, dan sektor pertanian-kehutanan-perikanan berkontribusi sebesar USD 0,39 miliar, dan

“Peningkatan ekspor sektor non migas sini terutama terjadi pada industri pengolahan yang naik secara YoY sebesar 5,24 persen. Andil industri pengolahan sebesar 4,21 persen,” kata Ateng.

Komoditas yang jadi kontributor ekspor non migas, antara lain nikel, minyak kelapa sawit, kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, serta semi konduktor dan komponen elektronik lainnya. (\*)



## BPS Catat Nilai Ekspor Jateng Per Maret Tembus 1.010,70 Juta Dolar AS

**S**EMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat nilai ekspor Jawa Tengah periode Maret 2025 sebesar 1.010,70 juta dolar AS.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan, angka itu turun 0,54 persen dibandingkan periode Februari 2025.

Dia menambahkan untuk nilai ekspor migas tercatat 30,40 juta dolar AS atau turun 11,99 persen. Kendati begitu, nilai ekspor nonmigas naik 0,14 persen, atau dengan nilai 980,30 juta dolar AS.

“Ekspor Jawa Tengah menurut sektor, untuk ekspor nonmigas menyumbang

96,99 persen dari total ekspor Maret 2025. Kita lihat ekspor menurut sektor, industri pengolahan masih dalam posisi tertinggi sebesar 962,85 juta dolar AS,” terang Endang dalam siaran langsung di kanal resmi BPS Jateng, Senin (21/4/2025).

Selanjutnya, sektor migas 30,40 juta dolar AS, pertambangan dan lainnya 0,36 juta dolar AS, dan pertanian 17,09 juta dolar AS. Dia menuturkan untuk pangsa ekspor nonmigas Jateng pada Maret 2025, BPS mencatat, Amerika Serikat masih mendominasi yaitu 46,70 persen atau senilai 457,84 dolar AS.

“Jadi bersiap bapak/ibu semua, terkait kebijakan Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump) yang nanti akan diterapkan



pexels-simon-r-minshall

pada bulan April 2025, dan akan terlihat di rilis kita pada bulan Mei 2025 seperti apa,” tuturnya.

Endang menambahkan, ada sepuluh barang HS (Harmonized System) dua digit, dengan peningkatan dan penurunan ekspor terbesar pada Maret 2025. HS disusun, disepakati, dan dipakai oleh hampir semua negara, dalam menentukan klasifikasi barang perdagangan dunia.

Sepuluh barang itu yaitu lima mengalami kenaikan cukup tinggi ada kode HS 64 alas kaki dengan kenaikannya 27,45 juta dolar AS, disusul kode HS 38 berbagai produk kimia sebesar 8,59 juta dolar AS, kode HS 03 ikan, krustasea dan moluska 7,46 juta dolar AS, kode HS 95 mainan, permainan dan keperluan olahraga serta kode HS 09 kopi, teh, dan rempah-rempah 2,74 juta dolar AS.

Lima kode HS lainnya mengalami penurunan, yakni kode HS 62 pakaian dan

aksesorisnya (bukan rajutan) 33,55 juta dolar AS, disusul kode HS 94 perabotan lampu 6,17 juta dolar AS, kode HS 44 kayu dan barang dari kayu 5,28 persen; HS 70 kaca dan barang dari kaca 3,42 juta dolar AS, dan kode HS 24 tembakau dan rokok 2,87 juta dolar AS.

Selanjutnya, nilai impor Jateng pada Maret 2025 mencapai 1.059,39 juta dolar AS, atau turun 10,92 persen dibandingkan Februari 2025. Penurunan itu karena sektor migas 17,87 persen dan nonmigas 4,52 persen.

Secara tahunan nilai ekspor Maret 2025, mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas 8,54 persen. Sebaliknya untuk sektor migas mengalami penurunan 35,95 persen atau senilai 30,40 juta dolar AS.

Endang menambahkan, untuk neraca perdagangan Jawa Tengah pada Maret 2025 secara total defisit 48,69 juta dolar AS.

“Kita defisit tipis, ya, 48,69 juta dolar AS,” terangnya. (\*)

”

**Secara tahunan nilai ekspor Maret 2025, mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas 8,54 persen. Sebaliknya untuk sektor migas mengalami penurunan 35,95 persen atau senilai 30,40 juta dolar AS.**



pexels-melquizedequ

## Impor Kedelai RI Melonjak, Negara Ini Jadi Pemasok Utama

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono menyebut kebutuhan kedelai nasional saat ini berada di kisaran 3 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

**M**enurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut masih sangat bergantung pada impor, dengan pasokan terbesar berasal dari Amerika Serikat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari hubungan dagang antarnegara yang saling melengkapi. “Sebagian besar pasokan memang dari Amerika Serikat, tetapi itu bukan satu-satunya sumber. Ini juga bagian dari hubungan dagang timbal balik antarnegara,” ujar Maino dalam Rakernas Gakoptindo, di Mess Kementerian Pertanian, Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan catatan Bapanas, volume impor kedelai Indonesia terus mengalami peningkatan

dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 tercatat sebesar 2,59 juta ton, naik menjadi 2,72 juta ton pada 2025, dan diperkirakan mencapai 2,87 juta ton pada 2026.

Amerika Serikat masih menjadi pemasok utama dengan kontribusi lebih dari 80% total impor. Disusul Kanada, Brasil, dan Argentina dengan porsi yang jauh lebih kecil. Distribusi impor juga masih terpusat di pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Hal ini mencerminkan bahwa industri pengolahan kedelai nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ia menjelaskan, fluktuasi harga kedelai tidak

semata-mata dipengaruhi oleh negara asal impor. Sejumlah faktor global turut berperan, mulai dari nilai tukar dolar AS hingga gangguan logistik.

Salah satu contoh yang disoroti adalah terganggunya jalur distribusi global pada periode tertentu, yang menyebabkan kapal pengangkut harus memutar rute dan berdampak pada biaya distribusi.

Selain itu, faktor musim panen di negara produsen juga turut memengaruhi harga. Saat musim panen, harga cenderung turun, sementara pada periode di luar musim (off season), harga biasanya mengalami kenaikan.

“Pada saat misalnya panen, tentu harga di sana juga lebih terkoreksi turun. Begitu juga pada saat off season, tentu harganya juga akan terkoreksi,” ucapnya.

Hingga saat ini, harga kedelai di tingkat importir masih berada di kisaran Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram. Di tingkat perajin tahu dan tempe, harga rata-rata berada di kisaran Rp11.000 per kilogram.

Pemerintah, lanjut Maino, terus memantau pergerakan harga tersebut agar tidak mengalami kenaikan signifikan yang dapat membebani pelaku usaha, khususnya pengrajin tahu dan tempe. “Jangan sampai harga terus meningkat dan memberatkan pelaku usaha. Itu yang terus kami cermati,” katanya. (\*)



pexels-king-shooter

## Kenaikan Harga Kedelai Impor Menekan Pengrajin Tempe Tahu di Jateng

**S**emarang-Kenaikan harga kedelai impor mulai menekan para pengrajin tempe dan tahu di Jawa Tengah. Kondisi ini memicu keresahan karena biaya produksi meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) Jawa Tengah, Sutrisno Supriantoro, mengatakan kenaikan harga kedelai telah melampaui 20 persen. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp11.000 per kilogram.

Ia mengungkapkan para pengrajin tempe dan tahu saat ini merasakan dampak langsung dari lonjakan harga bahan baku tersebut. “karena ini Harganya itu Lebih daripada 20% Dari harga semua Yang pemula harganya Rp9.000 Sekarang sudah mencapai Rp11.000 mbak hampir 30%,” ujarnya saat dialog bersama RRI, Jum’at, 10 April 2026.

Sutrisno menambahkan, tingginya harga kedelai tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor. Sekitar 90 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipasok dari luar negeri, terutama Amerika Serikat.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, menilai kenaikan harga kedelai juga dipengaruhi faktor nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga bahan baku impor semakin mahal di tingkat pelaku usaha.

Ia menjelaskan bahwa meskipun pasokan kedelai secara nasional relatif mencukupi, harga tetap mengalami kenaikan. Harga kedelai naik bukan karena stok kurang, tetapi karena faktor kurs rupiah yang melemah terhadap dolar sehingga biaya impor menjadi



pexels-polina-tankilevitch

lebih mahal.

“Artinya bahwa mahal ini bukan karena kurangnya stok tetapi karena memang harga faktor produksi naik, satu. Yang kedua, karena memang rupiah sedang melemah terhadap dolar dan ingat bahwa kita wajib beli dari US yang berbasis dolar, jadi itu yang kemudian menjadi awal,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya melalui penguatan produksi kedelai lokal, pengendalian harga impor, serta pemberian subsidi sebagai solusi sementara bagi pengrajin guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Dalam Kesempatan yang sama, ia juga melanjutkan, bahwa yang dapat diperbaiki adalah bagaimana Indonesia mengelola dan me-manage apa yang bisa dikelola. Pemerintah tentunya tidak bisa mengendalikan perang di timur tengah, dan tidak bisa menekan negara lain, karena bukan dalam otoritasnya. “Ya sebetulnya yang saya kira bisa dilakukan perubahan adalah ya bagaimana melakukan manajemen distribusi yang relatif mandiri di kita kan ada koperasi itu koperasi pengrajin tahu tempe. Mau tidak mau, kita harus membuat rencana tambahan gitu misalnya memperkuat petani lokal sehingga stok kedelai itu tidak hanya bergantung pada impor tapi kita juga bisa mandiri dengan kedelai lokal kita itu saya kira ya,” imbuhnya. (\*)

## Harga Kedelai di Jakarta Tembus Rp19 Ribu/Kg, Mendag: Pasokan Tak Bermasalah

**M**endag Budi Santoso meyakini, hingga kini pasokan pangan yang bersumber dari impor masih aman, terutama komoditas kedelai. Dia menegaskan, tak ada gangguan suplai pada komoditas bahan baku tahu dan tempe tersebut.

“Sampai sekarang kan enggak ada masalah (di impor kedelai) ya, mudah-mudahan sih enggak ada masalah ya, karena belum ada tanda-tanda juga,” ungkapnya ditemui usai mengunjungi pameran Intertext 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4).

Patut diketahui, mayoritas kedelai yang berada di Indonesia berasal dari impor. Mengutip Info Pangan Jakarta, per 16 April 2026, harga kacang kedelai di Jakarta terpantau stabil di level tinggi dibandingkan sehari sebelumnya.

Harga kacang kedelai ‘terendah’ berada di Jakarta Selatan Rp15.000/kg dan Jakarta Barat Rp15.333/kg. Sementara, harga kedelai Jakarta Pusat Rp18.000/kg, Jakarta Utara Rp19.500/kg, dan Jakarta Timur Rp27.500/kg. Jika dirata-ratakan harga kacang kedelai di Jakarta mencapai Rp19.000/kg.

Meski dinilai stabil, harga tersebut berada di atas ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur Peraturan Bapanas 12/2024, yakni senilai Rp12.000/kg untuk kedelai impor di tingkat konsumen, pengrajin tahu dan tempe dengan asumsi harga di tingkat importir Rp11.500/kg, dan senilai Rp11.400/kg untuk kedelai lokal.

Sebelumnya, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan harga kedelai. Pihaknya memastikan,



patokan harga kedelai yang dipasok importir masih berada dalam rentang harga yang diatur pemerintah.

"Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir. Bagaimana kondisinya saat ini, artinya naiknya tapi masih tidak terlalu signifikan dan dalam kategori sangat wajar. Namun demikian, secara ketentuan harga saat ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," terang Ketut, Selasa (14/4).

Dalam pantauan pemerintah, harga kedelai yang disalurkan sampai di pengrajin tahu dan tempe masih wajar dan sesuai ketentuan HAP. Pemerintah terus berkoordinasi intensif dengan importir dengan meminta tidak menaikkan harga kedelai terlalu signifikan untuk menjaga tekanan biaya pengrajin tahu dan tempe terkendali.

"Kami sudah memastikan ke importir untuk menjaga agar harga acuan dipastikan diberlakukan. Jangan sampai menaikkan melebihi harga acuan. Kami perintahkan, kami minta, dan ini juga memang amanat dari Bapak Menteri Pertanian sekaligus Bapak Kepala Bapanas," jelasnya.

Bapanas mencatat, berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) per 13 April 2026, harga kedelai di Jakarta paling rendah dibanderol Rp10.500/kg dan paling tinggi Rp11.000/kg. Secara keseluruhan, rerata harga kedelai di Regional Jawa berada di Rp10.555/kg.

Selanjutnya untuk Regional Sumatra terpantau cukup berfluktuasi dengan rerata harga Rp11.450/kg. Rerata harga kedelai di Regional Sulawesi pun tak jauh berbeda di Rp11.113/kg. Sementara rerata harga di Bali-NTB Rp10.550/kg dan Kalimantan Rp10.908/kg.

"Harga kedelai paling rendah itu Rp10.500-11.000/kg di Jakarta. Itu harga di tingkat pengrajin tahu tempe. Memang ada yang Rp12.000/kg, itu di Aceh dan Sumut. Namun sebenarnya kondisi harga kedelai di pengrajin tahu tempe masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," ujarnya.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan mencolok antara harga eceran di pasar yang menembus Rp27.500/kg dengan harga di tingkat pengrajin yang

masih terjaga di kisaran Rp11.000/kg

Ketut menegaskan, Bapanas tidak segan mencabut izin distributor sampai menahan izin importir, apabila para importir menetapkan harga kedelai melebihi kewajaran.

"Sekali lagi, arahan Bapak Kepala Bapanas, kasih rambu-rambu bagi importir dan distributor sehingga tidak serta-merta menaikkan. Keuntungannya jangan berlebihan sehingga kewajaran perlu dijaga," tambahnya.

Ketut menjelaskan, pemerintah berkomitmen menjaga harga kedelai sampai di tingkat pengrajin tahu dan tempe. Pemerintah akan melakukan intervensi apabila harga kedelai telah melampaui HAP tingkat konsumen, yakni Rp12.000/kg.

"Nah sekarang yang kita harus jagain adalah harga acuan di tingkat pengrajin itu Rp12.000/kg. Ini harus kita jaga dan jangan dilewati. Tatkala melewati Rp12.000, maka pemerintah akan melakukan intervensi. Sekali lagi, kita jaga bareng. Harga (kedelai) saat ini sebagian besar masih bawah

Untuk diketahui, dalam Proyeksi Neraca Pangan Kedelai 2026 yang diampu Bapanas, proyeksi produksi kedelai dalam negeri setahun ini diestimasikan mencapai 277,5 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi kedelai setahun mencapai 2,74 juta ton, yang mayoritas untuk kebutuhan pengrajin tahu dan tempe nasional.

Untuk diketahui, Bapanas bersama mitra kerja di daerah sepanjang 2025 telah melaksanakan program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk komoditas kedelai sebanyak 120.800 kg.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menegaskan perintahnya kepada para importir kedelai agar dapat saling menjaga harga. Amran meminta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar.

"Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir, jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik, tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan," tegas Mentan. (\*)



pexels-melquizedequ



pexels-mumtahina-tanni

## Industri Plastik Tertekan Logistik Global, Kemenperin Dorong Diversifikasi Bahan Baku

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya memahami gejolak geopolitik di Timur Tengah memberikan dampak pada rantai pasok yang cukup besar terhadap industri plastik nasional, terutama dari sisi logistik dan biaya produksi.

“Kemenperin memahami gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri,” kata Febri melalui keterangannya dikutip Senin (20/4).

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Antara lain kenaikan biaya logistik dan menyebabkan kenaikan pada freight pelabuhan, pengenaan surcharge

premium serta terganggunya waktu pengiriman dari Timur Tengah hingga ke industri nasional.

“Itu rata-rata biasanya 15 hari (pengiriman). Namun, karena situasi gejolak geopolitik saat ini, rata-rata pengiriman bahan baku petrokimia mencapai 50 hari. Tentu hal ini berdampak terhadap beban biaya produksi,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, kata Febri, Menteri



Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengumpulkan pelaku industri plastik nasional baik hulu hingga hilir guna memastikan kondisi pasokan tetap terjaga. Berdasarkan pertemuan, lanjut dia, industri menyampaikan jaminan bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah.

“Oleh karena itu, Menperin terus memantau bagaimana perkembangan pasokan bahan baku terhadap produksi plastik dan jaga pasokan plastik untuk industri kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Febri, Menteri Perindustrian menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kemandirian industri, salah satunya melalui diversifikasi bahan baku.

“Pengembangan bahan baku substitusi naphta dari sumber alternatif domestik misalnya crude palm oil, meski harganya relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk dieksplorasi sebagai strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tegas dia.

Sementara itu, Febri mengatakan Kementerian Perindustrian akan selalu menjaga keseimbangan kepentingan industri di hulu dan hilir agar produksi tetap berlanjut, serta mesin-mesin produksi tetap melakukan kegiatan produksinya di tengah tekanan global.

(\*)



**Pengembangan bahan baku substitusi naphta dari sumber alternatif domestik misalnya crude palm oil, meski harganya relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk dieksplorasi sebagai strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.**





pexels-enginakyurt

## Per 1 Juli 2026, Pemerintah Setop Impor Solar

**SURABAYA:** Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit

“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dilansir dari Antara, Minggu, 19 April 2026.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Ia menjelaskan sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

“Ini energi masa depan Indonesia. Karena

sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar.

“Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau sejumlah inovasi teknologi karya ITS, salah satunya traktor listrik yang dinilai lebih hemat dan efisien. Kementerian Pertanian langsung memesan 10 unit untuk uji coba karena tidak menggunakan bahan bakar solar, melainkan energi listrik.

“Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat,” ucapnya. (\*)

# 10 Pemasok Pupuk Impor Indonesia

Harga pupuk melambung di tengah perang Iran. Indonesia yang masih memiliki ketergantungan besar terhadap pupuk impor dikhawatirkan bisa terimbas.

**K**etergantungan Indonesia terhadap impor pupuk masih tinggi, bahkan menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir

Data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah negara seperti China, Rusia, dan Kanada tetap menjadi pemasok utama, dengan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh tensi geopolitik global.

Kebutuhan pupuk secara nasional di Indonesia kurang lebih 13 juta ton dengan total impor 6,3 juta ton. Indonesia juga masih mengimpor bahan baku pupuk seperti batuan fosfat (bahan baku pupuk NPK/SP-36) dan kalium/potash (bahan baku pupuk KCL).

China mencatatkan lonjakan signifikan menjadi 1.599 ton, diikuti Rusia sebesar 1.397 ton, serta Kanada yang kembali naik ke 1.260 ton setelah sempat turun tajam pada 2023.

Jika dilihat lebih dalam, pola impor pupuk Indonesia juga menunjukkan adanya pergeseran sumber pasokan dari waktu ke waktu. Pada periode sebelum 2022, impor cenderung lebih stabil dengan dominasi China dan Kanada sebagai pemasok utama.

Namun, memasuki 2022 terjadi lonjakan signifikan, khususnya dari Kanada dan Rusia, yang mengindikasikan adanya penyesuaian strategi impor untuk menjaga ketersediaan pupuk di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, pada 2023 sempat terjadi koreksi tajam di beberapa negara pemasok, sebelum akhirnya kembali meningkat pada 2024. Pola fluktuatif ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara, tetapi juga aktif melakukan penyesuaian sumber impor guna mengantisipasi risiko gangguan pasokan.

Gejolak tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Konflik geopolitik global, khususnya perang Rusia dan Ukraina sejak 2022, menjadi faktor utama yang mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

Selain itu, konflik di Timur Tengah juga memicu krisis pengapalan di Selat Hormuz yang kini dinobatkan sebagai gangguan pasokan paling mengerikan dalam sejarah pasar energi dan komoditas global. (\*)



pexels-drphotographer152

“Krisis pengapalan di Selat Hormuz saat ini adalah gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global,” ujar Birol mengutip World Economic Forum (WEF) pada Minggu, (05/04/2026).

Kawasan Teluk Arab merupakan pusat utama pertanian global yang menyumbang setidaknya 20% dari seluruh ekspor pupuk jalur laut. Ketergantungan dunia bahkan lebih akut pada urea, jenis pupuk nitrogen yang paling banyak digunakan, dimana 46% perdagangan global berasal dari wilayah ini.

Pasokan ini sangat krusial bagi ekonomi pertanian besar seperti India, Brasil, dan China. Analis memperingatkan bahwa gangguan yang berkepanjangan akan memperketat ketersediaan di wilayah-wilayah yang bergantung pada impor, yang berpotensi melambungkan biaya produksi pangan global serta meningkatkan tekanan inflasi.

#### **Dampak Bagi Pangan**

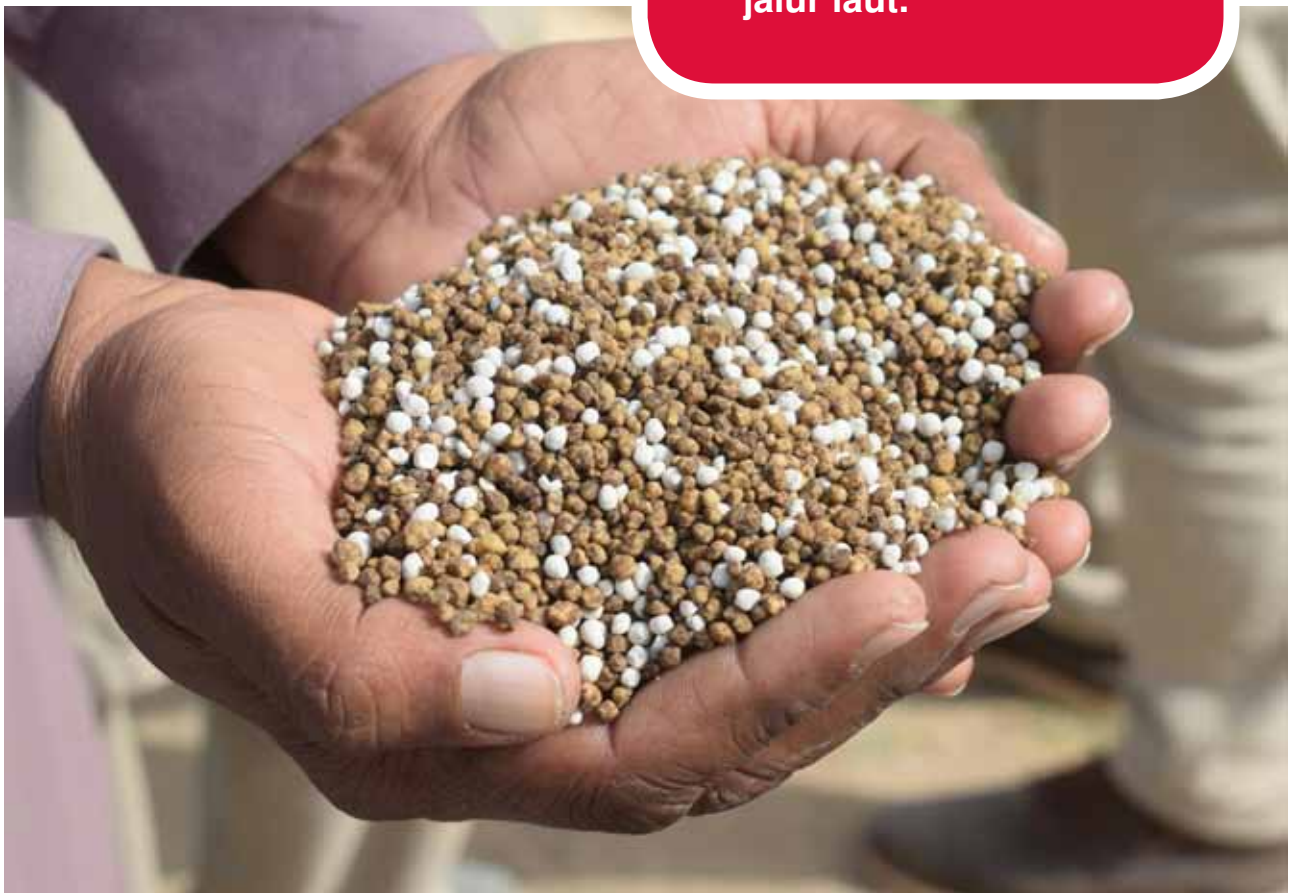
Data proyeksi menunjukkan indeks pangan global naik dari 93,3 pada kuartal IV-2025 menjadi 99,2 pada kuartal I-2026, lalu 103,6

pada kuartal II-2026. Tekanan ini bertahan sepanjang tahun sebelum cenderung stabil pada 2027.

Secara tahunan, harga pangan global diperkirakan naik 6% pada 2026. Ini terasa langsung di banyak negara karena harga gandum, jagung, minyak nabati, hingga beras sangat dipengaruhi ongkos angkut dan biaya input pertanian.

Jika kapal memutar rute lebih jauh, pupuk terlambat datang, atau cuaca buruk datang bersamaan, harga di pasar ritel dapat bergerak lebih cepat dari angka global. (\*)

**Kawasan Teluk Arab merupakan pusat utama pertanian global yang menyumbang setidaknya 20% dari seluruh ekspor pupuk jalur laut.**



pexels-kkwritesofficial

# Purbaya Kenakan Bea Masuk Anti Dumping Impor BOPET dari 3 Negara Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk biaxially oriented polyethylene terephthalate alias BOPET yang berasal dari India, China, dan Thailand.

**P**engenaan bea masuk dengan tarif khusus untuk produk BOPET dari tiga negara itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2026 yang berlaku tiga hari sejak diterbitkan 1 April 2026.

“Bahwa hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah membuktikan praktik dumping atas impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand masih berlanjut, sehingga pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan,” dikutip dari PMK 14/2026 yang Purbaya tandatangi pada 13 Maret 2026, dikutip Kamis (2/4/2026).

Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian, dan telah diperkenankan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).

Adapun BMAD yang dikenakan untuk impor produk BOPET di antaranya dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand, dikenakan Bea

Masuk Antidumping.

Berbagai bentuk barang dari BOPET itu lalu dikenakan BMAD yang merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Adapun tarif BMAD detailnya sebagai berikut:

1. India dengan produsen SRF Limited dikenakan tarif BMAD 8,5%, Vacmet India Limited 4,0%, Jindal Poly Films Limited 6,8%, Ester Industries Limited 4,5%, dan perusahaan Lainnya 8,5%
  2. China dengan produsen Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd dikenakan tarif BMAD 2,6%, dan perusahaan Lainnya 10,6
  3. Thailand dengan perusahaan SRF Industries (Thailand) Limited dikenakan tarif BMAD 5,4%, Polyplex (Thailand) Public Company Limited 2,2%, A.J. Plast Public Company Limited 7,1%, dan perusahaan Lainnya 7,1%
- (\*)



europas.com



## Aturan Baru Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor untuk Hibah Resmi Berlaku

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 (PMK 99/2025) tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas Impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial, kebudayaan atau kepentingan penanggulangan bencana alam.

**K**etentuan ini resmi mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2012 (PMK 69/2012) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2012 (PMK 70 Tahun 2012), dan berlaku mulai 27 Februari 2026.

Pada ketentuan sebelumnya permohonan diajukan secara tertulis, sementara pada PMK 99/2025 proses pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan cukai dilakukan secara elektronik. Seluruh permohonan beserta lampiran dokumennya kini wajib dikirimkan ke portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Sistem Indonesia

National Single Window (SINSW).

Pengajuan tertulis hanya diperbolehkan jika sistem SINSW sedang mengalami gangguan operasional.

PMK 99/2025 juga mengubah batas waktu pemberian persetujuan. Pada PMK 69/2012 dan PMK 70/2012 proses persetujuan atau penolakan permohonan pengajuan diberikan batas 14 hari kerja. Sementara itu, pada PMK 99/2025 persetujuan diterbitkan maksimal dalam waktu 5 jam kerja untuk pengajuan elektronik, dan 1 hari kerja untuk pengajuan tertulis.

Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)

DJBC tidak memberikan keputusan atau tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 10 PMK 99/2025.

Wewenang persetujuan yang sebelumnya ada pada Direktur Jenderal kini dilimpahkan kepada Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Untuk meningkatkan pengawasan, pemerintah memperketat aturan mengenai kewajiban pasca impor bagi para penerima fasilitas pembebasan. Berdasarkan Pasal 30 PMK 99/2025, setiap penerima fasilitas diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu pengimporan. Jika kewajiban pelaporan ini diabaikan, Kepala Kanwil DJBC dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan fasilitas pembebasan di masa mendatang sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

PMK 99/2025 juga mengatur secara khusus mengenai penanganan barang hibah berwujud kendaraan bermotor dalam bentuk jadi atau dikenal dengan Completely Built Up (CBU). PMK 99/2025 mendefinisikan kendaraan bermotor CBU sebagai alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan



**Peraturan Menteri  
Keuangan  
Nomor 99 Tahun  
2025 (PMK 99/2025)  
tentang pembebasan  
bea masuk dan/atau  
cukai atas Impor  
barang kiriman hadiah/  
hibah untuk keperluan  
ibadah, umum, amal,  
sosial, kebudayaan  
atau kepentingan  
penanggulangan  
bencana alam.**

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, laut atau udara.

Untuk kendaraan bermotor CBU kewajiban kepabeanaan diselesaikan melalui tiga mekanisme, yaitu diekspor kembali, dipindahtangankan kepada pihak lain yang berhak menerima, atau dimusnahkan sesuai Pasal 15 PMK 99/2025. Khusus pemindahtanganan terdapat syarat, yaitu kendaraan hanya dapat dialihkan, jika telah digunakan minimal selama dua tahun sejak tanggal pemberitahuan pabeaan impor, atau setelah kegiatan tertentu seperti penanggulangan bencana dinyatakan selesai. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor kendaraan bermotor CBU untuk hibah/hadiah. Mengingat kendaraan CBU umumnya merupakan barang yang tergolong mewah, dan tidak diproduksi di dalam negeri. (\*)



pexels-alshreef

## Soroti Lonjakan Impor, Kemenperin Pacu Industri Kendaraan Niaga Kuasai Pasar Domestik

**K**ementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan distribusi barang di Indonesia. Hal ini turut mendukung kinerja industri alat transportasi yang selama ini merupakan salah satu subsektor strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).

Sekjen Kemenperin menjelaskan, kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya yang mencapai 2,02 persen terhadap PDB nasional. “Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta

peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko.

Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.

“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya. Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.

Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan

niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5 persen menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya hampir 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58 persen, di bawah batas efisiensi skala industri.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional. Pada tahun 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit, di mana kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.

“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenperin tetap proaktif mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) dalam rangka menciptakan sistem logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. “Dukungan ini dilakukan melalui penguatan standar teknis kendaraan niaga, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan ke dalam sistem nasional,” ujar Eko.

Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa dokumen resmi, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.

Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius. “Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dinilai semakin strategis sebagai platform business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kehadiran 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung menunjukkan kesiapan sektor ini dalam menjawab kebutuhan logistik nasional.

“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk



**Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025.**

meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” ujar Eko.

Kemenperin berharap melalui penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dapat terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan. “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyampaikan, sektor kendaraan komersial memiliki peran vital sebagai tulang punggung distribusi nasional. “Truk dan bus merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang tetap terjaga, serta menjadi motor penggerak mobilitas publik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kendaraan komersial yang tangguh, efisien, dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujarnya.

Putu juga menambahkan, kinerja ekspor industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 mencatat capaian positif dengan total ekspor kendaraan utuh (CBU) mencapai 518.212 unit atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diakui di pasar global. Lebih lanjut, Putu menegaskan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting sebagai jembatan antara industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kami menargetkan lebih dari 11 ribu trade visitors dan berharap ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di pasar internasional,” tambahnya. (\*)



pexels-lagosfoodbank

## Mulai 16 April, Sistem Pelacakan Makanan akan Diterapkan

**M**enurut surat edaran tersebut, kegiatan penelusuran asal-usul makanan harus mengikuti prinsip “satu langkah maju - satu langkah mundur”, yang memungkinkan identifikasi sumber bahan baku dan penerima produk di seluruh proses produksi dan bisnis. Perusahaan bertanggung jawab untuk membangun, menyimpan, dan memperbarui data penelusuran asal-usul, termasuk informasi tentang fasilitas produksi, produk, batch, dan asal-usul bahan baku.

Surat edaran tersebut juga menetapkan penerapan sistem ketertelusuran pangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyediakan data. Produk pangan harus

diberi label dengan kode ketertelusuran untuk membantu pihak berwenang dan konsumen memeriksa informasi dengan mudah.

Terkait peta jalan implementasi, fasilitas produksi pangan harus menyelesaikan koneksi sistem sebelum 1 Desember 2026, sedangkan fasilitas impor harus melakukannya mulai 1 Maret 2027. Untuk fasilitas produksi skala kecil, Surat Edaran ini mendorong partisipasi dalam sistem ketertelusuran untuk secara bertahap menstandarisasi operasional.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan sistem ketelusuran, serta berkoordinasi dengan daerah setempat dalam hal inspeksi, pengawasan, dan panduan implementasi. (\*)

# Harga Bahan Baku Tekstil Meroket 40 Persen

**I**NDUSTRI tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan berat setelah harga bahan baku melonjak tajam. Ini terjadi akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia hingga sekitar US\$ 110 per barel.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan harga paraxylene—bahan baku utama polyester—kini mencapai US\$ 1.300 per ton. Ia mengatakan angka tersebut naik sekitar 40 persen hanya dalam dua pekan terakhir.

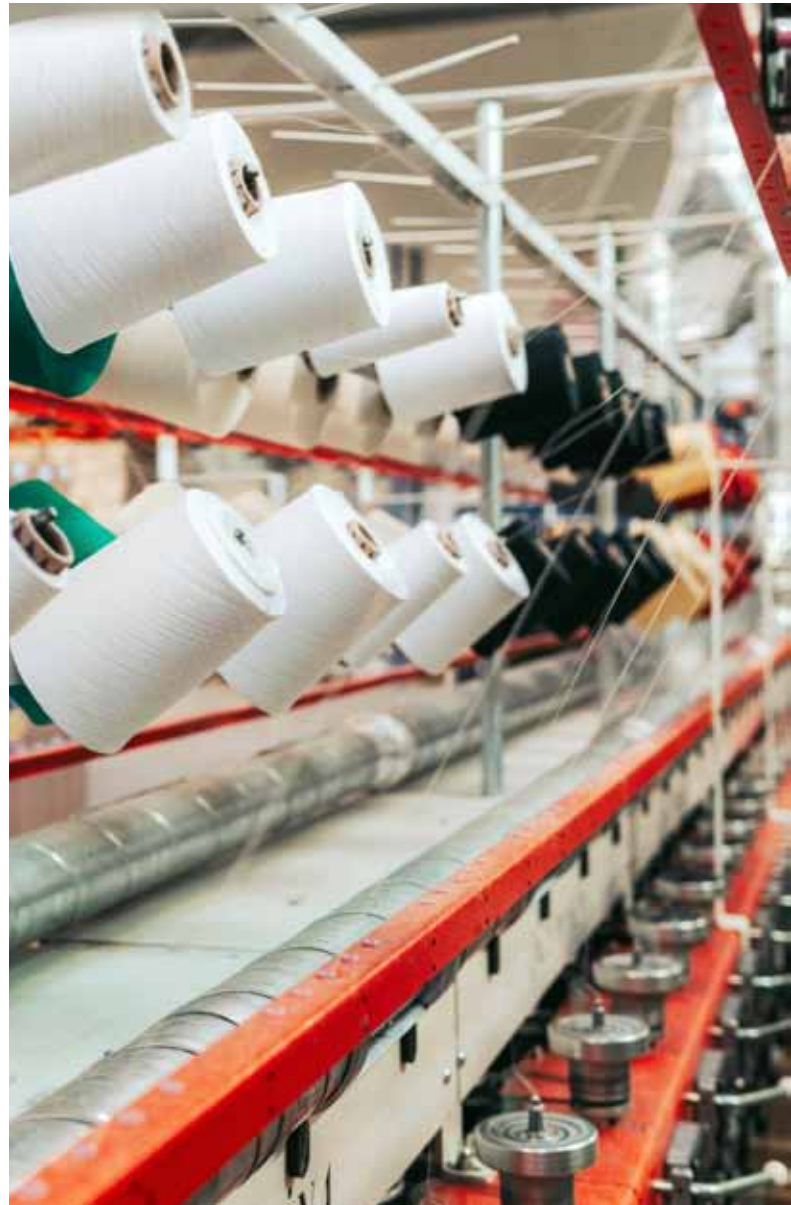
“Dalam satu pekan ke depan akan terasa di produsen kain, lalu dua pekan berikutnya baru ke sektor pakaian jadi,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Meski lonjakan harga terjadi di hulu, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan industri hilir. Redma menjelaskan, efek kenaikan harga akan merambat secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan.

Redma mengatakan kenaikan harga ini juga diperkirakan akan berimbas ke tingkat ritel. Harga produk tekstil jadi berpotensi naik hingga 10 persen seiring penyesuaian biaya produksi.

Di tengah tekanan harga, ia menyatakan permintaan pasar masih relatif stabil, bahkan cenderung meningkat karena harga bahan baku impor ikut naik sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif. Ketersediaan bahan baku dalam negeri seperti polyester maupun rayon juga dalam kondisi aman.

Namun, kata Redma, kondisi industri belum sepenuhnya pulih. Tingkat utilisasi produsen polyester



pexels-seyfidurmaz

nasional masih di bawah 40 persen, sementara utilisasi produsen rayon sekitar 70 persen. Redma menyebut banyak pabrik yang sudah berhenti belum kembali beroperasi akibat praktik pasar yang dinilai tidak sehat.

“Saat ini produsen yang masih bertahan hanya melayani konsumen loyal. Sementara pengguna bahan baku impor belum menjadi prioritas,” katanya. (\*)

# Industri Tekstil Cari Impor Baru, Tapi Pasokan Global Terbatas

**A** **SOSIASI** Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) mulai mencari alternatif sumber impor bahan baku di tengah meningkatnya ketidakpastian global, usai gagalnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran di Islamabad, Pakistan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apsyfi Farhan Aqil Syauqi menyatakan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara produsen bahan baku polyester sebagai langkah diversifikasi. Namun,



sama halnya dengan yang mereka alami, negara-negara tersebut juga menghadapi keterbatasan pasokan.

“Kita sudah coba komunikasi dengan negara-negara penghasil bahan baku polyester. [Tapi ternyata] mereka juga terbatas supply-nya dan harga menyesuaikan harga minyak dunia,” kata Farhan kepada Bloomberg Technoz, Selasa (14/4/2026).

Kondisi ini, kata Farhan, juga membuat industri tekstil turut memantau perkembangan biaya logistik di tengah memanasnya situasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Meski sejauh ini ia menyatakan belum ada peralihan rute distribusi, namun risiko gangguan rantai pasok tetap menjadi perhatian.

“Sejauh ini, untuk industri hulu tekstil masih terkendala fluktuasi harga minyak, kurs, dan supply

bahan baku,” jelasnya.

Adapun sebagai upaya meredam kenaikan biaya produksi, Apsyfi mendorong adanya intervensi pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal. “Satu-satunya [cara] untuk mengurangi kenaikan biaya ini dengan intervensi PPN [pajak pertambahan nilai] misalnya, dengan pembebasan PPN. Ini bisa mengurangi cost perusahaan.”

Sebelumnya, Ketua Umum Apsyfi Redma Gita Wirawasta menerangkan, harga paraxylene yang merupakan bahan baku utama polyester saat ini sudah berada di level US\$1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari beberapa pekan lalu.

Redma menjelaskan kenaikan harga ini belum sepenuhnya sampai ke industri hilir. Efek domino yang disebabkan kenaikan harga bahan baku tekstil, kata dia, akan berimbas secara bertahap hingga tiga pekan ke depan.

“Dalam 1 minggu kedepan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” ungkap Redma, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menambahkan, sektor retail juga akan terdapat penyesuaian harga. Dia menyebut kenaikan harga barang jadi ritel bisa sampai dengan 10%.

“Diperkirakan kenaikan di sektor ritel akan berada di sekitar 10%” katanya.

Sementara dari sisi permintaan pasar, Apsyfi melihat masih dalam level yang stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku impor juga jadi lebih tinggi dari produk lokal.

Adapun dalam perkembangan terbaru dari konflik antara AS dan Iran diketahui bahwa Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pemerintahannya terkait negosiasi perdamaian, seiring AS memulai blokade laut di Selat Hormuz.

Meski Trump berupaya mendorong kembali jalannya negosiasi, hanya sedikit tanda kemajuan setelah perundingan akhir pekan gagal di Islamabad. Iran menyalahkan runtuhnya pembicaraan tersebut pada AS, dan Tehran belum mengonfirmasi adanya pembicaraan lanjutan pada Senin. (\*)



pexels-michael-fischer

## Barantin Fasilitas Pemasukan Hewan Ternak dari Australia

**S**IDOARJO — Badan Karantina Indonesia (Barantin) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui pengawasan ketat terhadap kedatangan hewan ternak impor asal Australia. Selain untuk memasok ketersediaan protein hewani, pemasukan hewan ternak ini juga ditujukan untuk memperbaiki dan memperkaya keanekaragaman hayati. Deputi Bidang Karantina Hewan, Sriyanto, menegaskan bahwa setiap pemasukan ternak wajib dipastikan kesehatannya melalui pemeriksaan fisik hingga laboratorium sebelum dilepaskan.

“Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat serta bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK),” ujarnya.

Sebagai informasi, ratusan hewan ternak impor asal Australia masuk melalui Bandar Udara Internasional Juanda, Jawa Timur, pada Senin (30/3) pukul 19.29 WIB menggunakan pesawat kargo. Ternak yang didatangkan terdiri atas 23 ekor sapi perah, 35 ekor unta, serta 145 ekor

domba dari jenis Texel, Suffolk, dan Dorper.

Setibanya di Surabaya, seluruh ternak langsung dibawa ke Instalasi Karantina Hewan (IKH) milik Karantina Jawa Timur di Tandes untuk menjalani masa karantina. Selama periode tersebut, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan secara ketat guna memastikan seluruh ternak bebas dari penyakit hewan menular strategis, seperti brucellosis, paratuberculosis (Para TB), enzootic bovine leucosis (EBL), bovine viral diarrhea (BVD), serta lumpy skin disease (LSD). Jika sudah dipastikan kesehatannya maka dilakukan akan dilakukan pelepasan.

Sriyanto menjelaskan, kehadiran sapi perah impor diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi susu nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan khususnya ketersediaan protein hewani. Menurutnya ketersediaan produk peternakan, khususnya susu dan daging juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah terkait pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Pasokan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan

halal menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

“Kami memastikan setiap ternak yang masuk telah melalui pengawasan ketat, sehingga produk turunannya dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara aman dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani, masuknya domba Texel, Suffolk, dan Dorper juga dinilai dapat memperbaiki dan memperkaya keanekaragaman genetik ternak di Indonesia.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur (Karantina Jawa Timur), Sokhib menambahkan bahwa kebutuhan terhadap sapi perah masih cukup tinggi, sehingga impor menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pasokan. Hal tersebut dapat dilihat dari data impor pada sistem layanan digital Best Trust Badan Karantina Indonesia sepanjang 2025 yang mencatat sebanyak 2.863 ekor sapi perah, serta 265 ekor domba yang terdiri atas 230 ekor domba Dorper dan 35 ekor domba Suffolk impor masuk ke Jawa Timur.

Sriyanto menambahkan bahwa pengawasan lalu lintas hewan impor merupakan bagian penting

dalam menjaga keamanan hayati nasional. Melalui pengawasan yang optimal, ternak impor yang masuk diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan sektor peternakan nasional serta mendukung program swasembada pangan secara berkelanjutan.

“Kami memastikan seluruh prosedur karantina dilaksanakan sesuai standar, sehingga risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar negeri dapat dicegah,” tutupnya.

**Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat serta bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)**



pexels-nc-farm-bureau-mark

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING  
ATAS IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYETHYLENE  
TEREPHTHALATE YANG BERASAL DARI INDIA,  
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk juga dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
- c. bahwa hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah membuktikan praktik dumping atas impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand masih berlanjut, sehingga pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan;
- d. bahwa pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand, telah berakhir masa berlakunya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas

Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208)

Memperhatikan :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL DARI INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

#### Pasal 2

Terhadap impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99 yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

#### Pasal 3

Negara asal barang dan produsen/perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tarif Bea Masuk Antidumping tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:
  - a. bea masuk umum (most favoured nation); atau
  - b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau

kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

#### Pasal 5

- (1) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor biaxially oriented polyethylene terephthalate yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
PURBAYA YUDHI SADEWA

## KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE APRIL 2026



### ■ HALAL BI HALAL FKAM TANJUNG EMAS

Selasa, 07 April 2026 diselenggarakan acara Halal Bi Halal FKAM (Forum Komunikasi Asosiasi Maritim) Tanjung Emas di Hotel Patrajasa Semarang.



### ■ PENGUKUHAN BPD GINSI JAWA TIMUR MASA BHAKTI 2025 - 2030

BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara Pengukuhan BPD GINSI Jawa Timur pada hari Kamis, 09 April 2025 di Surabaya.



**BULETIN**



**GINSI** *Jateng*